

**“TIDAK ADANYA MAHAR HINGGA PUTUSAN PERCERAIAN
BA’DA DUKHUL (ANALISIS PUTUSAN PA JEPARA NOMOR
1130/PDT.G/2016/PA.)”**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari’ah Dan Hukum



Oleh:

DENY IRAWAN

132111051

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2018**

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum

Perum BP1 P 12, Ngaliyan, Semarang

Dr. Hj. Naili Anafah, SHL, M.Ag

Jl. Sendang Utara Rt.05 Rw.08, Gemah, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. DENY IRAWAN

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : DENY IRAWAN

NIM : 132111051

Jurusan : Ahwalul Syakhsiyah

Judul Skripsi : **"Tidak Adanya Mahar Hingga Putusan Perceraian Ba'da
Dukhul (Analisis Putusan PA Jepara Nomor
1130/PDT.G/2016/PA.)"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2017

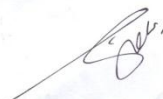
Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum

NIP 19560101 198403 2 001

Pembimbing II



Dr. Hj. Naili Anafah, SHL, M.Ag

NIP.19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

NOTA PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan:

Judul : "TIDAK ADANYA MAHAR HINGGA PUTUSAN PERCERAIAN BA'DA
DUKHUL (ANALISIS PUTUSAN PA JEPARA NOMOR
1130/PDT.G/2016/PA.)

Penulis : DENY IRAWAN

NIM : 132111051

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga/Ahwal al-syahsiyyah

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ilmu
Hukum UIN Walisongo Semarang dinyatakan "LULUS" dengan predikat
cumlaude baik/cukup, pada tanggal 06 Juni 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Semarang, 06 Juni 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji

Dr. EOKHMADI, M.Ag.
NIP.196605481994031002

Penguji Utama I

BRILIYAN ERNA WATI, SHL., M.Hum
NIP.196312191999032001



Sekretaris / Penguji

Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M. Hum
NIP. 195601011984032001

Penguji II

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A
NIP. 197606272005012003

PEMBIMBING

Pembimbing I

Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M. Hum
NIP.195601011984032001

Pembimbing II

Dr. Hj. NAILI ANAFAH SHL., MAG
NIP.198106222006042022

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”

PERSEMBAHAN

ORANG TUA TERCINTA, BUDIYONO DAN MASRUROTUN.

ADIK SAYA SATU-SATUNYA ANA YULIYANA YANG

SENANTIASA MEMBERI SEMNGAT KEPADA SAYA

TEMAN TEMAN AS ANGKATAN 2013 YANG TIDAK BISA SAYA

SEBUTKAN SATU SATU

SEDULUR KMJS(KELUARGA MAHASISWA JEPARA

SEMARANG) DAN PARA SENIOR YANG TELAH MENDIDIK

DALAM BERORGANISASI DI KAMPUS UIN WALISONGO

POSKO 14 KKN MIT 3 TAHUN 2017 YANG TELAH BERBAGI

ILMU SELAMA KKN

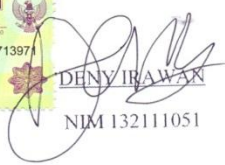
DEKLARASI

Dengan penuh kejuuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 20 november 2017

Deklarator




DENY IRAWAN

NIM 132111051

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SK Menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandangan (al-) disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

Huruf Hijaiyah	Huruf Latin	Huruf Hijaiyah	Huruf Latin
ا	A	ط	t{
ب	B	ظ	z{
ت	T	ع	‘
ث	ś	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s{	ي	Y
ض	d{		t{

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

او = au

اي = ai

ABSTRAK

Al-Quran telah menjelaskan bahwa perempuan yang dicerai pada waktu ba'da dukhul berhak mendapatkan mahar (Qs;al-Baqarah;237). Beberapa ulama, seperti Imam Malik, diwajibkan bagi laki-laki untuk memberikan mahar apabila ia menceraikan istrinya dalam posisi ba'dha dukhul. Berbeda halnya dengan putusan PA Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA tentang perceraian *ba'da dhuhul* yang dalam putusannya menyatakan tidak adanya mahar bagi istri. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah. *Pertama*, Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan agama jepara NO 1130/PDT.G/2016/PA tentang tidak adanya mahar dalam putusan perceraian ba'da dukhul. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan pengadilan agama jepara NO 1130/PDT.G/2016/PA tentang tidak adanya mahar dalam putusan perceraian ba'da dukhul.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara atau interview, dokumentasi, studi kepustakaan selanjutnya penulis mengolah data dengan metode analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian kemudian menganalisisnya. Dalam hal ini penulis menggambarkan kasus tersebut dari pengajuan perkara, sampai perkara tersebut diputuskannya. Kemudian dari gambaran tersebut, penulis analisis dengan berdasarkan undang-undang yang terkait dengan kasus tersebut serta mengacu pada Kompilasi Hukum Islam tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, fikih munakahat, hukum acara perdata, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: *pertama*, dijelaskan dalam isi putusan, bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak adanya mahar untuk si istri kurang tepat. Sebab, nuyuz bukan dasar pertimbangan tidak adanya mahar. Melainkan fasakh. Selain itu, Hakim hanya berlandaskan pada PP No 9 tahun 1975 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengesampingkan tentang dalil ataupun landasan bahwa istri yang dicerai telah dikumpul. Dengan memutuskan tanpa beban terhadap suami untuk memberikan mahar. *Kedua*, hakim PA Jepara telah memutuskan bahwa istri yang dicerai setelah ba'dha dhukhul tidak mendapatkan mahar. Padahal, al-quran telah menjelaskan bahwa bahwa perempuan yang dicerai pada waktu ba'da dukhul berhak mendapatkan mahar (Qs;al-Baqarah;237).

Kata Kuni: Pernikahan, Perceraian, Mahar

KATA PENGANTAR

Assalamualaykum. Wr.wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Antin Latifah, M.Ag, selaku ketua Prodi Ahwal As-Syahsiyah atas segala bimbingannya.
4. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, masukan, kemudahan dan pandangan positif kepadapenulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Dr. Hj. Naili Anafah, SHL., M.Ag Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, masukan, kemudahan dan motivasinya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Seluruh keluarga besar penulis : Bapak, Ibu, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin YaRabbal Alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM MAHAR DAN PERCERAIAN

A. Pengertian Mahar.....	19
B. Dasar Hukum Mahar	23
C. Macam-Macam Mahar.....	25
D. Kewajiban Membayar Mahar	39

E. Pengertian Perceraian	49
F. Dasar Hukum Perceraian	53

BAB III GAMBARAN UMUM PA JEPARA DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Dan Profil Pengadilan Agama Jepara	57
B. Visi & Misi PA Jepara.....	61
C. Struktur Organisasi PA Jepara.....	63
D. Putusan No/1130/Pdt.G/2016/PA.Jepr	65
E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Jepara Mengenai Tidak Adanya Mahar Hingga Putusan Perceraian Bakda Dukhul (Putusan PA Jepara No/1130/Pdt.G/2016/PA.Jepr	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan PA Jepara No/1130/Pdt.G/2016/PA.Jepr Tentang Tidak Adanya Mahar Dalam Perceraian Bakda Dukhul	78
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PA Jepara No/1130/Pdt.G/2016/PA.Jepr Tentang Tidak Adanya Mahar Dalam Perceraian Bakda Dukhul	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Penutup	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku semua Makhluknya.¹ Hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.² Dapat kita cermati Firman Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah." Q.S. Adz-Dzariyat Ayat 49.³

Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan, Allah SWT. menciptakan manusia menjadi berkembang biak dari generasi satu ke generasi berikutnya. Keturunan merupakan hal yang penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 2, Terj. Nor Hasanuddin, Cet. I. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 478.

² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Toha Putra, 1993, hlm. 5.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : 1998, hlm.862

dilarang agama, dan mengamalkan *syari'at* Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga, yang dalam ruang lingkup yang luas, juga akan menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.⁴

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga kedudukan hukum perkawinan ini oleh Islam dipandang sangat penting. Oleh karena itu, masalah-masalah mengenai perkawinan di atur dengan jelas dan terperinci dalam *syari'at* Islam. Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberikan hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. pada zaman *jahiliyyah*, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan sewenang-wenang dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya.⁵

Setelah itu, Islam datang dengan menghilangkan belenggu ini, kemudian istri diberikan hak *mahar* (maskawin), dan kepada suami diwajibkan memberikan *mahar* kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapa saja, walaupun sangat dekat dengannya. Dan orang lain tidak boleh untuk menjamah apalagi menggunakan

⁴ Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 3, hlm.75.

⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 40.

harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan mendapatkan ridho dan kerelaan si istri.⁶

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. *Mahar* ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mengaulinya secara *ma'aruf*.⁷ Allah berfirman dalam Al quran QS. An-Nisaa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa' : 4)⁸

⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 84-85.

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001, hlm. 108.

⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 115.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (Q.S. An-Nisa’: 34).⁹

Dengan demikian, *mahar* merupakan hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela tanpa mengharap imbalan sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan keluarganya. Akan tetapi tidak menjadi rukun dalam nikah, keadaan ini mengandung arti bahwa apabila jika di dalam akad nikah tidak disebutkan jumlah dan bentuk *mahar*, maka pernikahan tersebut tetap sah.¹⁰ Akan tetapi pada *galibnya* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, masalah *mahar* tetap disebutkan pada waktu akad nikah menurut ukuran yang pantas. Selain itu, masalah *mahar* dapat juga

⁹ *Ibid*, hlm.123.

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 55.

disebutkan setelah berlangsungnya akad nikah, jadi tidak harus pada akad nikah saja.¹¹

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal *mahar*, demikian juga batas minimalnya.¹² Hal ini disebabkan adanya tingkatan kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam memberinya. Disamping itu, harus disertai pula dengan kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Dalam beberapa *hadits* justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak terlalu besar. Sebaliknya pemberian maskawin secara berlebihan justru dilarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan pernikahannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk atau bahkan merusak secara personal maupun sosial¹³.

Apabila akad nikah berlangsung tidak disebutkan berapakah maskawin atau *mahar* yang diberikan, maka perkawinan itu tetap sah, tetapi *mahar* tetap wajib dibayar, dan disebut *mahar mitsil*.¹⁴ Apabila *mahar* telah diberikan oleh suaminya kepada istrinya dalam bentuk apa saja, maka *mahar* tersebut beralih

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *hukum perdata*, hlm. 465.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, 1990, hlm. 14.

¹³ Amir Syarifuddin, *Lok. Cit*, hlm. 221.

¹⁴ *Mahar Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Lihat Abd. Rahman Ghazaly. *Op. cit.*, hlm. 93.

menjadi milik istri secara individual.¹⁵ Penyerahan *mahar* dilakukan secara tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan *mahar* boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Karena *mahar* yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.¹⁶ Tentang hal ini diserahkan bagaimana kebiasaan (tradisi) di dalam masyarakat. Akan tetapi apabila suami belum menyerahkan *mahar*, istri mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami-istri, sampai dipenuhinya *mahar* tersebut. Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai *mahar*. Hal ini karena *mahar* bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaran akan terjadi.

Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 55.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.104.

tangga. Putusnya perkawinan, dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.¹⁷

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Demikian juga apabila terjadi perceraian sebelum *dukhul* suami wajib membayar setengah *mahar* yang telah ditentukan dalam akad pernikahan.¹⁸ Hal ini berdasarkan Firman Allah:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّيْنِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 80

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001, hlm. 205

Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah : 237)¹⁹

Apabila perceraian terjadi sebelum berhubungan (*qobla dukhul*) dan besarnya *mahar* belum ditentukan, maka suami wajib membayar *mahar mitsil*.²⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 35 ayat 3 disebutkan bahwa apabila perceraian terjadi *qobla dukhul* tetapi besarnya belum di tetapkan, maka suami wajib membayar *mahar mitsil*. Tetapi kalau menurut Imam Malik apabila suami meninggal sebelum terjadinya hubungan biologis (*Qobla Dukhul*), maka tidak wajib membayar *mahar*, tetapi istri mendapatkan warisan saja. Menurut Syarah dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* di dijelaskan bahwa apabila suami istri menikah dan *maharnya* belum ditentukan, maka nikah tersebut diperbolehkan menurut Imam Malik, dan *maharnya* bisa diberikan setelah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), apabila suami istri ini sudah melakukan hubungan badan kemudian suami mentalaknya, maka istri tidak mendapatkan *mahar* tetapi mendapatkan *mut'ah*.²¹ Dan apabila suami meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*) dengan istrinya dan *maharnya* belum disepakati maka istri tidak mendapatkan *mahar* dan tidak mendapatkan *mut'ah*, tetapi istri mendapatkan warisan. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 58.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum* , hlm.105.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 397.

Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan bahwa manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadinya percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas *mahar mitsil* secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya.²²

Bertolak dari perbedaan pendapat di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang tidak adanya mahar dalam perceraian *ba'da dukhul*. Sedangkan di terangkan dalam *al qur'an* dan pendapat para Imam, perceraian *ba'da dukhul* mendapat mahar bagi istri. Namun, dalam putusan PA Nomor 1130/PDT.G/2016/PA. Tentang perceraian *ba'da dhuhul* tidak adanya mahar bagi istri. Oleh karena itu melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan memaparkan ke dalam skripsi yang berjudul **“Tidak Adanya Mahar Hingga Putusan Perceraian *Ba'da Dikhul* (Analisis Putusan PA Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA.)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan agama jepara NO 1130/PDT.G/2016/PA tentang tidak adanya mahar dalam putusan perceraian *ba'da dukhul*?

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab “Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali”*, Terj. Masykur A.B., dkk, Fiqh Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 366.

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan pengadilan agama jepara NO 1130/PDT.G/2016/PA tentang tidak adanya mahar dalam putusan perceraian ba'da dukhul.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan agama jepara NO 1130/PDT.G/2016/PA tentang tidak adanya mahar dalam putusan perceraian ba'da dukhul
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap putusan pengadilan agama jepara NO 1130/PDT.G/2016/PA tentang tidak adanya mahar dalam putusan perceraian ba'da dukhul

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Maka, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menambah referensi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman tentang mahar sebagai pemberian.
3. Sebagai sumbangan pemikiran yang berupa karya ilmiah kepada para pembaca, pada umumnya bagi akademika UIN Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Sejalan dengan permasalahan yang telah penulis paparkan, untuk lebih mendalam tentang tidak adanya mahar

dalam perceraian ba'da dukhul maka penulis melakukan penelaahan terhadap atau karya skripsi lain yang membahas tentang masalah tersebut, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Hikmah Shoaleh tahun 2013 dengan judul “Studi Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama No.447/PDT.G/2011/PA.PTK tentang Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga.” Dalam skripsi ini, akibat dari talak dijelaskan bahwa ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Maka dijelaskan bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla Ad Dukhul*. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *Qabla Ad Dukhul*. Dan wajib memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk yang belum mencapai 21 tahun.²³
2. Skripsi yang disusun oleh Noor Baayah tahun 2011 dengan judul “Hak-hak Istri Akibat Perceraian Perbandingan Imam

²³ Hikmah shoaleh *studi analisis terhadap putusan pengadilan agama No.447/PDT.G/2011/PA.PTK*, Fakultas syariah walisongo semarang.

Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.” Dalam skripsi ini dijelaskan persamaan hak istri akibat perceraian menurut pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami tanpa dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *Ba'da Al Dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami diatur dalam KHI di Indonesia Pasal 158 sama pendapat dengan Imam Syafi'i. Di jelaskan juga besarnya *Mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan KHI di Indonesia diatur pada pasal 160.²⁴

3. Skripsi karya Umi Masrurroh yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar Kaitannya Dengan KHI Pasal 31”. Skripsi ini memaparkan tentang batas minimal mahar menurut Imam Malik dalam suatu perkawinan adalah seperempat dinar. Sedangkan KHI tidak memberikan ketentuan tentang batas minimal atau maksimal tentang besarnya pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri.²⁵

Dari beberapa referensi di atas menjelaskan bahwa perceraian *Ba'da Dukhul* maupun *Qabla Dukhul* seharusnya mendapatkan mahar, sedangkan spesifikasi skripsi ini hendak

²⁴ Noor bayah tahun 2011 *hak-hak istri akibat perceraian perbandingan imam sfai'I dan komplikasi hukum islam* fakultas syariah walisongo.

²⁵ Umi masrurroh *studi analisis pendapat imam malik tentang batas minimal mahar kiatannya dengan KHI Pasal 31* fakultas syariah walisongo

mengkaji keputusan pengadilan Agama Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA tentang perceraian *Ba'da Dukhul*, dan menjelaskan dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara nomor 1130/PDT.G/2016/PA.JEPR yang tidak mendapatkan mahar.

F. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh metode yang digunakan. Oleh karena itu metode penelitian perlu ditetapkan berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*²⁷. Dalam hal ini penulis meneliti salinan putusan Pengadilan Agama Jepara nomor 1130/PDT.G/2016/PA tentang perceraian *Ba'da Dukhul*.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dari mana data yang diperoleh untuk memudahkan

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 3.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi dua yaitu²⁸:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁹ Data primer dalam skripsi ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1130/Pdt.G/2016/PA.JEPR tentang perceraian *Ba'da Dukhul*.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang disebut dengan data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya³⁰ :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, PP. No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974, Inpres RI No. 1 tahun 1971 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan yang relevan.
2. Buku–buku yang relevan diantaranya *Fiqih Munakahat*, Hukum Perdata Islam di Indonesia serta buku–buku lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.206.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 17.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. hlm. 9.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Metode pengumpulan data dibutuhkan untuk mempertanggungjawabkan keakuratan data yang disajikan.³¹ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Dokumentasi

Yaitu kertas asli tertulis tangan atau tercetak yang bersifat resmi yang melengkapi informasi atau digunakan sebagai bukti tentang sesuatu.³² Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset (Penelitian pendahuluan) sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal di Pengadilan Agama Jepara. Dalam hal ini berupa salinan putusan perkara Agama Jepara No. 1130/PDT.G/2016/PA sebagai latar belakang penelitian

b. Wawancara

Yaitu metode dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait, dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai

³¹ P. Joo Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 39.

³² Sutrisno Hadi, Metode Research cet. X, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hal. 9.

(*interviewer*).³³ Wawancara ini penulis lakukan dengan hakim yang menangani perkara tersebut, guna mendapatkan pendapat mengenai putusan No.1130/PDT.G/2016/PA yang akurat. Dukungan lain agar mendapatkan informasi ilmiah penulis juga mewawancarai para ahli hukum Islam. .

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu bahwa dalam menganalisis penulis berkeinginan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁴ Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Jepara.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan dalam Skripsi, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam skripsi. Skripsi ini

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 76.

berisi dari lima bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang semuanya merupakan bab pembuka sebagai gambaran pembahasan secara global.

BAB II, Tinjauan Umum Tentang Mahar dan perceraian. Dalam bab ini menjelaskan tentang perceraian yang meliputi pengertian, dasar hukum perceraian, Dan menjelaskan mahar yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, dan macam mahar.

BAB III Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1130 / Pdt. G / 2016 / Pa. Jepara Tentang Perceraian *Ba'da Dukhul*. Pada bab tiga ini meliputi profil pengadilan agama Jepara yang berisi sejarah pengadilan agama Jepara, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Jepara, menjelaskan kasus perceraian Nomor 1130/PDT.G/2016/PA. JEPR tentang perceraian ba'da dukhul, proses penyelesaiannya dan hasil putusan serta dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nomor 1130/PDT.G/2016/PA. JEPR tentang perceraian ba'da dukhul.

Bab IV, Analisis Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1130/Pdt.G/2016/Pa.Jepr. Dalam bab ini menganalisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA. JEPR tentang tidak adanya mahar dalam

perceraian *Ba'da Dukhul* dan analisis tinjauan hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA. JEPR tentang tidak adanya mahar dalam perceraian *Ba'da Dukhul*.

Bab V, Penutup. Bab lima berisi kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang ditulis pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisikan ringkasan dari hal yang didapat, dalam hal ini adalah ringkasan hasil putusan Agama Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA. JEPR tentang perceraian *ba'da dukhul*. Sedangkan saran berisi tentang masukan dari penulis atas hasil penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DAN PERCERAIAN

A. MAHAR

1. Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa arab *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar), Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.³⁵

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.”³⁶ Islam adalah agama yang sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainya atau siapapun walaupun sangat dekat denganya. Orang lain tidak boleh menjamah apa lagi

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *loc.cit*.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.84.

menggunakanya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.³⁷

Allah SWT berfirman :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³⁸

Imam syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.³⁹

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri

³⁷ *Ibid.*, hlm. 175

³⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Atlas, 1998. hlm. 115.

³⁹ Abdurahman Al-jaziry, *Al-Fiqh' ala Madzahib al-arba'ah.*, juz 4, hlm.94

memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.⁴⁰ Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَثَرُ

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.”⁴¹

Dari surat An-Nisa’ 24 pengertian mahar adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela. Allah SWT berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفَحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ وَلَا

⁴⁰ Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita*, Tt: Lintas Media, 2007. hlm. 397.

⁴¹ Departemen agama RI, *Op Cit.* Hlm. 119.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاۤصِيتُمْ بِهِ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِیْضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیْمًا
حَكِیْمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’: 24)⁴²

Sedangkan menurut syara’ mahar adalah sesuatu yang wajib, sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui.⁴³

Nihlah adalah pemberian. Maskawin disebut *nihlah* karena perempuan bersenang-senang dengan suami sebagaimana suami bersenang-senang dengan istri dengan adanya maskawin, bahkan yang lebih senang adalah si istri, seolah-

⁴² Departemen agama RI, *Op Cit*, hlm. 120-121.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.

olah istri mengambil maskawin itu tanpa memberi imbalan apa-apa kepada suami.⁴⁴

Mazhab Maliki mendefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.⁴⁵ Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelah dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat dan persetubuhan secara paksa.⁴⁶

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁴⁷

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang antara kedua suami istri.⁴⁸ Hal ini berdasarkan al-Qur'an dan hadits, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

⁴⁴ Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita*, Tt:Lintas Media, 2007, hlm. 397.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng Illa, Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Jakarta: Gema Insani, 2011, cet. 1, hlm. 230.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 231.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali *op. cit.*, hlm. 85.

⁴⁸ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, hlm.83.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁴⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin.⁵⁰

Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5 berkaitan dengan kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَوَطَعَاكُمْ ۖ حِلٌّ هُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ

⁴⁹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Atlas, 1998. hlm. 115.

⁵⁰ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 183.

مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. Al-Maidah : 5)⁵¹

3. Macam-macam Mahar

Pelaksanaan akad nikah pada masa Rasulullah SAW ada kalanya *mahar* itu disebutkan pada saat nikah, dan diserahkan sekaligus pada waktu itu, atau bahkan sudah diterima sebelum akad nikah. Tetapi juga pernah pada waktu dilaksanakan akad nikah, *mahar* belum diserahkan dan bahkan tidak disebutkan berapa kadar banyaknya oleh calon suami. Maka akhirnya para ulama’ menyimpulkan bahwa penyerahan *mahar* itu bisa secara

⁵¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Semarang : Toha Putra, 2002. Hlm. 107.

tunai (kontan) dan bisa juga ditunda (dihitung) dalam penyerahannya. Namun yang lebih utama adalah penyerahan *mahar* secara tunai, walaupun tidak langsung lunas tetapi hanya sebagian apabila tidak mampu seluruhnya.

Adapun mengenai macam-macam *mahar*, adalah sebagai berikut:

a. Mahar Ditinjau dari Kualifikasi:⁵²

1. Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.⁵³ Sekarang ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

Pertama, mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai satu perangkat alat shalat.

Kedua, mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah "*hantaran*" atau "*tukon*" (dalam bahasa jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau

⁵² Yang di maksud dengan *kualifikasi mahar* adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya.

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera Basritama, 2001, hlm. 365.

calon istri. Mahar dalam bentuk “terselubung” seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.⁵⁴

Para *fuqaha* mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu :

- 1) Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
- 2) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamr, babi, dan lain-lain.

Mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh juga berupa hewan atau tumbuh- tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material.⁵⁵

Idris Ahmad membagi sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan maskawin, seperti mata uang, barang (emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik), makanan dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.⁵⁶

⁵⁴ M. Labib al-Buhiy, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung : al-Ma'arif, 1983, hlm. 63

⁵⁵ Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003, hlm. 35.

⁵⁶ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Karya indah, 2002, hlm. 3.

2. Mahar dalam bentuk Jasa atau manfaat

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupabenda atau harta.⁵⁷ Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat diartikan dengan melihat dari pendapat para ulama, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*.
2. Ulama Malikiyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *watha'* atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
4. Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha'* syubhat dan *watha'* yang dipaksakan.⁵⁸

⁵⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 668.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 6758.

Definisi di atas tampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfa'at, mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sebagainya.

Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 25 :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang

beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka *menurut* yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Al-Qur'an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Karena itu, keluarkanlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak karena hubungannya dengan

⁵⁹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Semarang : Toha Putra, 2002. Hlm. 82.

seorang laki-laki. Islam memuliakan mereka dengan tidak menganggap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri.

Mahar dalam bentuk jasa juga terdapat dalam al-Qur'an yaitu menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.⁶⁰ Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ مِنَ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.”⁶¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang bapak boleh meminang seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak terjadi di masa Rasulullah

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 91.

⁶¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan nya*, Op. Cit., hlm. 310.

SAW, bahkan ada di antara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawini oleh Rasulullah SAW atau supaya Rasulullah mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkannya oleh Rasulullah.

3. Ditinjau dari Klasifikasi Mahar

Para ulama telah mengklasifikasikan mahar ke dalam dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.⁶²

1. *Mahar Musamma*

Mahar musamma adalah pemberian mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia.⁶³

Mahar musamma terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Mu'ajjal*

Mahar Mu'ajjal adalah *mahar* yang segera diberikan kepada istri atau *mahar* yang di berikan secara kontan.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 140.

⁶³ Ahmad Rabi' Jabir ar-Rahili, *op. cit.*, hlm. 28.

2) *Muajjal*

Mahar muajjal adalah *mahar* atau maskawin yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri atau *mahar* yang pemberiannya secara terhutang.⁶⁴

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Suami telah menggauli istrinya⁶⁵. Tentang ketentuan ini Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisa' : 21)⁶⁶

⁶⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 84.

⁶⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988, hlm. 224

⁶⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 64.

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan. Dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali,

2) Salah satu dari suami istri meninggal.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya *mahram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur,⁶⁷ berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَصِيفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 93.

لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah : 237)⁶⁸

2. *Mahar Mitsil*

Yaitu *mahar* yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau *mahar* yang diukur (sepadan) dengan *mahar* yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.⁶⁹

Adapun pendapat menurut para ulama tentang *Mahar Mitsil*, yaitu sebagai berikut:

⁶⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁶⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Op Cit.*, hlm. 93.

- a) Menurut ulama Hanafiyah, mahar *mitsil* adalah mahar perempuan yang menyerupai istri pada waktu akad, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya.
- b) Menurut Hanabilah, mahar *mitsil* adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada.⁷⁰
- c) Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian mahar *mitsil* sebagai berikut: mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lain dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegadisan, kejandaan, dan negerinya pada saat akad nikah

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 6775 - 6776.

dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya.⁷¹

- d) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mahar *mitsil* ialah mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan mahar perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat.⁷²

Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa mahar *mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar dan bentuknya belum ditentukan.⁷³

Mahar *mitsil* itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya, seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka kerabat yang ada.⁷⁴

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar *mitsil* adalah mahar yang

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid III, Cet. I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 49.

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, 6776.

⁷³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Cet II, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 80

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang belum ada ketentuan besar kecilnya serta jenis mahar yang akan diberikan. Mahar ini menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negerinya pada saat dilaksanakan akad nikah. Sebab, nilai mahar bagi seorang perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini. Yang dijadikan acuan dalam kesetaraan dari segi kerabatnya seperti saudaranya bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.⁷⁵

Mahar *mitsil* terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut⁷⁶:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 421.

⁷⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. Syihabuddin Jakarta:Gema Insani, 2007 hlm. 651.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah tafwidh*. Hal ini menurut *jumhur* ulama dibolehkan. Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
مَتَّعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ ۝

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.” (Al-Baqarah : 236)⁷⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.⁷⁸

4. Kewajiban Membayar Mahar

Mahar menjadi gugur atau menjadi hapus seluruhnya, dibebaskan dari kewajiban membayar mahar sepenuhnya, apabila terjadi perceraian di antara suami

⁷⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 94.

isteri sebelum bersetubuh, sedangkan perceraianya itu disebabkan oleh:

- a. Permintaan dari isteri karena pada suami terdapat cacat badan, atau suami tidak mampu memberi nafkah, dan kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
- b. Permintaan dari suami karena pada isteri terdapat cacat badan, atau isteri keluar dari Islam, kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
- c. Suami menthalak isterinya sebelum terjadi bersetubuh, sedang suami ketika akad perkawinan tidak menetapkan kesanggupan membayar sejumlah mahar, hanya suami dalam hal ini berkewajiban memberi mut'ah (pemberian untuk menggembirakan isteri).⁷⁹

Maskawin menjadi gugur sehingga hanya seperdua yang tetap menjadi wajib atas suami, jika terjadi talak oleh suami sebelum bersetubuh sedangkan mahar telah ditetapkan jumlahnya.⁸⁰

Apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia qobla dukhul, misalnya apabila suami meninggal sebelum bersetubuh dengan istrinya maka si istri berhak

⁷⁹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 43-44.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

menuntut maskawin seluruhnya dari tinggalkan kekayaan suaminya, disamping menerima waris yang berlaku baginya yaitu seperempat kalau suami tidak punya anak atau seperdelapan apabila suami mempunyai anak. Demikian pula ahli waris si perempuan berhak menuntut maskawin dari suaminya apabila si perempuan meninggal dunia sebelum dicampuri suaminya. Demikian ijma' para ulama dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Adapun perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang suami sudah pernah berduaan dengan istrinya di tempat yang sepi maka istri sudah berhak menuntut maskawinnya, beralasan dengan hadis Abu Ubaidah dari Zaid bin Abi Aufa, ia berkata: “Khulafaur Rasyidin telah menetapkan bahwa apabila pintu telah ditutup dan kelambu sudah dipasang maka maskawin wajib dibayarkan”. Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Daud pemimpin mazhab Zhahiriyah berpendapat bahwa maskawin itu tidak dapat diminta seluruhnya kecuali apabila suami istri itu telah berhubungan kelamin.⁸¹ Berkhawat atau menyepi berduan di tempat sepi hanya

⁸¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 224-225.

mewajibkan separuh maskawin. Beralasan dengan firman Allah:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...” (Q.S. Al-Baqarah : 237)⁸²

Adapun sebab-sebab yang menggugurkan maskawin itu ialah:

1. Suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya senggama (qobla dukhul) datang dari pihak istri.
2. Istri mengajukan fasakh karena suami miskin atau cacat.
3. Suami itu mengajukan fasakh karena istri itu cacat.

Dengan sebab-sebab di atas kewajiban memberi mut'ah juga gugur. Karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu daripadanya. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi, sebagaimana halnya hukum seorang penjual yang tidak jadi menyerahkan barangnya kepada pembelinya.

⁸² Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 58.

Begitu juga maskawin itu gugur apabila istri belum disenggamai itu merelakannya (melunaskan) atau menghibahkan kepada suaminya. Dalam hal seperti ini gugurnya mahar dikarenakan isrtinya sendiri yang menggugurkan. Dan mahar adalah hak penuh bagi istri.⁸³

Dalam Tafsir Al-Maraghi, ada keterangan bahwa wanita yang ditalak terdapat empat macam yaitu sebagai berikut⁸⁴:

- a. Wanita yang ditalak tetapi sudah disetubuhi dan telah di tentukan maharnya. Wanita yang ditalak ini akan tetap mendapat mahar yang sudah ditentukan. Wanita inilah yang dimaksud di dalam firman Allah:

....وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا....

Artinya: “...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka...”. (Q.S. Al-Baqarah: 229)⁸⁵

- b. Wanita yang ditalak, tetapi belum disetubuhi dan maharnya belum ditentukan. Maka wanita ini wajib diberikan mut’ah sesuai dengan kemampuan suami.

⁸³ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Fiqh Sunnah* 7, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1990, hlm. 68.

⁸⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz II*, Semarang : Toha Putra, 1984, hlm. 380

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 55.

Dan wanita seperti ini tidak mendapatkan mahar. Ini sesuai firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۖ وَعَلَى
الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَّعُوا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Baqarah : 236)⁸⁶

- c. Wanita yang ditalak belum disetubuhi, tetapi maharnya sudah ditentukan. Ia berhak mengambil separuh mahar yang sudah ditentukan. Dan ia juga beriddah. Itulah yang dimaksudkan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat: 237.
- d. Wanita yang ditalak sudah disetubuhi, tetapi maharnya belum ditentukan. Maka ia dibolehkan

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.58.

mengambil mahar yang sepadan (mahar mitsil) dan bagi suami wajib membayarnya.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S. an-Nisa’ : 21)⁸⁷

Persengketaan dalam sebuah rumah tangga bisa muncul karena isteri mengatakan belum menerima maskawin, sedangkan suami mengatakan telah memberi. Peristiwa di atas bisa terjadi meskipun mahar dijelaskan bentuk, jenis dan nilainya dalam akad perkawinan, namun bila mahar tersebut tidak diserahkan secara langsung dalam akad yang dipersaksikan dua orang saksi, maka dalam masalah perkawinan selanjutnya mungkin terjadi perselisihan suami isteri dalam mahar tersebut; baik perselisihan itu dalam nilai atau dalam waktu penyerahannya. Ulama berbeda pendapat dalam

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 120.

penyelesaiannya. Jika peristiwa di atas terjadi, maka masalah yang muncul adalah perkataan siapakah yang dapat diterima sebagai kebenaran? Malik berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata isteri sebelum dukhul, namun bila sudah dukhul maka yang dipegang adalah kata-kata suami.⁸⁸

Imam Malik berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata isteri sebelum dukhul dan kata-kata suami sesudah dukhul. Sebagian pengikut Malik mengatakan bahwa yang mendorong Malik berpendapat demikian adalah kebiasaan yang berlaku di Madinah bahwa seorang suami tidak boleh menggauli istrinya kecuali sesudah membayar maskawin. Jika dalam suatu negeri tidak terdapat kebiasaan seperti itu, maka yang dipegangi selainnya ialah kata-kata istri.

Pendapat yang mengatakan bahwa selamanya yang harus dipegangi ialah kata-kata istri, lebih baik, lantaran ia menjadi pihak tergugat. Tetapi Malik lebih mempertimbangkan kuatnya alasan suami apabila ia telah menggauli istrinya. Di kalangan pengikut Malik terjadi silang pendapat, apabila terjadinya dukhul tersebut sudah lama, apakah yang dipegangi adalah kata-

⁸⁸ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II, hlm.23.

kata suami beserta sumpahnya atau tidak? Disertai sumpah, itu lebih baik.⁸⁹ Sedangkan Al-Syafi'i mengatakan bahwa apabila suami isteri bersengketa dalam masalah penerimaan mahar, maka yang dipegang adalah kata-kata isteri.⁹⁰

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam perspektif Imam Malik masalah sebelum atau sesudah dukhul menjadi kriteria diterimanya suatu pengakuan. Sebagian pengikut Malik mengatakan bahwa yang mendorong Malik berpendapat demikian adalah kebiasaan yang berlaku di Madinah bahwa seorang suami tidak boleh menggauli isterinya kecuali sesudah membayar maskawin. Jika dalam suatu negeri tidak terdapat kebiasaan seperti itu maka yang dipegangi selamanya ialah kata-kata isteri.⁹¹

Pendapat Malik di atas jelas berbeda dengan al-Syafi'i yang tidak menggunakan kriteria dukhul melainkan kriterianya adalah perpisahan suami isteri. Pendapat al-Syafi'i ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama sebagaimana diungkapkan Ibnu Rusyd dalam kitabnya, *Bidâyah al Mujtahid*, yang mengatakan bahwa

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.23.

⁹⁰ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 77-78

⁹¹ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.* hlm.23.

apabila suami isteri bersengketa mengenai masalah penerimaan mahar, si isteri mengatakan belum menerima mahar, sedangkan suami mengatakan telah memberi mahar, maka jumhur fuqaha yakni Syafi'i, Tsauri, Ahmad, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa yang dipegangi adalah kata-kata isteri.⁹²

Keterangan di atas terdapat pula dalam kitab Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri bersengketa soal telah atau belum diterimanya mahar, misalnya si isteri mengatakan belum menerima, sedangkan si suami mengatakan si isterinya sudah menerima, maka menurut Imamiyah, Syafi'i dan Hambali bahwa yang diterima adalah isteri, sebab ia adalah pihak yang membantah tuduhan, sedangkan suami adalah pihak penuduh, maka ia harus membuktikan. Sedangkan menurut Hanafi dan Maliki: yang dipegang adalah pendapat isteri manakala sengketa tersebut terjadi sebelum percampuran, dan perkataan suami manakala hal itu terjadi sesudah percampuran.⁹³

⁹² *Ibid.*,

⁹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 379.

B. PERCERAIAN

1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut '*thalaq*' atau '*furqah*'. Kata *Thalaq* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari lafadz قُلِّطَ - قُلِّطَ - قُلِّطَ, yang bermakna melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata *thalaq* merupakan *isim mashdar* dari kata قُلِّطَ - قُلِّطَ - قُلِّطَ yang artinya menceraikan.⁹⁴

Adapun arti dari *thalaq* membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqoh* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri. Perkataan *Thalaq* dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Thalaq* menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. *Thalaq* dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁹⁵

⁹⁴ Zaid ibn Husain Hamid, *Kamus Muyassar*, Pekalongan: Raja Murah, 1982, hlm. 332.

⁹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 103-104

Dalam bahasa Indonesia juga dipakai kata talak yang artinya perceraian antara suami istri atas kehendak suami.⁹⁶ Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.⁹⁷

Menurut Bahder Johan Nasution, SH, M. Hum., dkk. mereka mengatakan perceraian adalah penjatuhan *thalaq*. Dan pengertian *thalaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁹⁸

Menurut Subekti, perceraian adalah: “penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.⁹⁹

Sedang menurut Hensyah Syahlani, SH: “perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dengan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat

⁹⁶ Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 888

⁹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, hal. 41.

⁹⁸ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 31

⁹⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984, hlm.

pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan Pengadilan”.¹⁰⁰

Putusnya perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 38 yang menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena¹⁰¹:

a) Kematian.

Mengenai kematian sebagai salah satu sebab bubarnya perkawinan tidak perlu diuraikan karena dengan adanya kematian salah satu pihak, maka secara otomatis perkawinan mereka menjadi putus.

b) Perceraian

Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak.

c) Atas Keputusan Pengadilan

Yang dimaksud putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan adalah keputusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan (*fasakh*). Sebagaimana diatur dalam Kompilasi

¹⁰⁰ Hensyah Syahlani, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hlm. 5

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm 45

Hukum Islam, bahwa sebuah perkawinan dapat juga dibatalkan karena adanya alasan-alasan yang dibenarkan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI. Dimana batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dipertegas oleh *Kompilasi Hukum Islam* pasal 113, juga disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas putusan Pengadilan.¹⁰² Salah satu diantara penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam membicarakan masalah perceraian, meskipun hal itu sudah ada aturannya dalam Undang-undang perkawinan, namun karena aturan-aturan yang ada dalam Bw tersebut pernah berlaku di Indonesia, maka tidak ada salahnya jika mendapat perhatian dalam pembahasan masalah ini. Dan apabila kita perhatikan lebih jauh mengenai Undang-undang Perkawinan ini, maka sebenarnya isi Undang-undang perkawinan ini merupakan perpaduan antara Hukum Islam dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Bw. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bersifat nasional dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, maka Undang-undang perkawinan ini telah sah dan

¹⁰² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 2000, hlm. 56.

menghapus aneka warna hukum perkawinan untuk berbagai golongan penduduk Indonesia, sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini. Di sisi lain Undang-undang ini juga memberlakukan agama masing-masing atau kepercayaan menjadi hukum yang positif untuk masalah perkawinan termasuk perceraian. Hal tersebut tampak jelas dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang mengatakan tidak ada perkawinan di luar agama dan kepercayaannya sesuai Undang-undang Dasar 1945.¹⁰³

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian merupakan putusanya tali ikatan suci perkawinan antara suami dengan istri yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak menghasilkan perdamaian dari para pihak karena adanya alasan-alasan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian atau *thalaq* dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.¹⁰⁴

¹⁰³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984, hlm 69

¹⁰⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 268.

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat)¹⁰⁵.

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Perceraian dalam hukum positif diatur dalam:¹⁰⁶

¹⁰⁵ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm 88.

¹⁰⁶ UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
- c. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan;
- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan beberapa sumber hukum di atas, maka dengan menilik kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum talak itu dibagi menjadi 4, yaitu:¹⁰⁷

- a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan *thalaq* digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri jika masing-masing pihak melihat bahwa *thalaq* adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi *syiqoq* kasus *ila* dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

- b. Sunah

Thalaq disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *'afifah* (menjaga

¹⁰⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.214-217

diri, berlaku terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

c. Haram

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *thalaq* diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan madharat, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.

d. Makruh.

Berdasarkan Hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JEPARA DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara

1. Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Jepara

Pada zaman Hindia Belanda lahir sebuah Penetapan Kerajaan Belanda, *Statsblad* tahun 1882 No. 152 Pasal 1 berbunyi:¹⁰⁸

"Disamping tiap-tiap *landraad* di Jawa dan Madura ada sebuah *priesterrad* (raad agama) yang daerahnya sama luasnya dengan daerah *landraad* itu".

Pasal 2 berbunyi:

"*Raad Agama* itu terdiri atas seorang ketua, yaitu penghulu yang diangkat untuk *landraad*, dan sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ahli agama Islam sebagai anggota : anggota-anggota ini dalam daerah-daerah *gubernurnemen* di Jawa dan Madura diangkat oleh residen dan dalam daerah kerajaan-kerajaan Jawa oleh Gubernur".

Berdasarkan pasal 1 dan 2 tersebut di atas, di Jepara dibentuk suatu badan peradilan agama Islam dengan sebutan "*Raad Agama di Masjid Afdeeling Jepara*" yang wilayah kekuasaannya sama dengan wilayah kekuasaan *landraad* (Pengadilan Negeri) Jepara yaitu Kabupaten Dati II Jepara di

¹⁰⁸ A. Basiq Djalill, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 17.

tambah pulau Karimun Jawa. Dengan keputusan residen Kudus, telah diangkat untuk pertama kali penghulu *landraad* Jepara yaitu sebelum tahun 1900 adalah Mas Kyai Haji Mohammad Soleh, dengan ahli-ahli agama Islam yang merupakan sebagai anggota oleh *Regent* (Bupati) Jepara dari naib-naib masjid Mayong, Pecangaan, Sendang, Jepara dan Bangsri. Sesuai dengan namanya, *Raad* Agama di masjid, maka persidangan dilakukan di serambi masjid Jepara, yang pada perkembangan berikutnya dibangun sebuah kantor yang terletak dimuka sebelah kanan masjid Jepara, persidangan dilakukan di tempat ini yang terdiri dari 2 ruang terbuka, yakni ruangan untuk perkawinan (NTR) dan 1 ruangan yang lain untuk persidangan Pengadilan Agama.¹⁰⁹

Setelah Indonesia merdeka, dengan penyempurnaan struktur organisasi dalam lingkungan Departemen Agama, kantor yang ditempati oleh Instansi-instansi Departemen Agama Tingkat Kabupaten dan Pengadilan Agama yang menempati ruangan $\pm 70\text{-}80 \text{ m}^2$ tidak lagi memadai. Oleh karena itu, pengurus kas masjid kabupaten Jepara kantor tersebut dibongkar dan dibangun lagi diatas tanah wakaf masjid pada tahun 1951 yang kemudian ditempati pada tahun 1953 oleh:

¹⁰⁹Tim Penyusun PA Jepara, *Sejarah Peradilan Agama Jepara*, Jepara: PA Jepara, 1989.

- Kantor Urusan Agama (Kepenghuluan) Kabupaten
- Kantor Urusan Agama (Kecamatan - Kenaiban) Jepara
- Kantor Pendidikan Agama kabupaten Jepara
- Kantor Penerangan Agama kabupaten Jepara
- Kantor Pengadilan Agama kabupaten Jepara¹¹⁰

Selama masa pembangunan, Pengadilan Agama Jepara menyewa rumah penduduk (pak Sumo) dan setelah Raden Mohammad Moesa ditetapkan lagi (1952), maka kantor Pengadilan Agama Jepara pindah di rumah beliau (ruang tamu dan beranda).¹¹¹

Hukum Islam dan pengadilan yang menegakkannya telah berlaku di Indonesia sejak Islam masuk dan berdiri kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Pada awalnya, Penjajahan Belanda di Indonesia tidak mengusik keberadaan Hukum Islam dan pengadilannya. Hal itu dapat dilihat pada tahun 1760, VOC memberlakukan “compendium freijer” sebagai pegangan mengadili sengketa perdata Islam. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda membentuk Pengadilan Agama yang disebut “Priesterraad” dengan Stbl Tahun 1882-152.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Tim Penyusun PA Jepara, *Op.Cit.* 1989.

¹¹² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2009, hlm 23

Dalam perkembangannya, penjajah Belanda menerapkan politik hukum baru yang mengasingkan Hukum Islam dan Pengadilan Agama berdasarkan teori “Receptio” dari Cornelis Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa Hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau telah diresepsi (diterima) oleh hukum adat. Dengan Stbl. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan landraad (Pengadilan Negeri), tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri dan dicabut kewenangannya untuk mengadili perkara warisan.¹¹³

Pada masa penjajahan Jepang, Peradilan Agama Islam disebut “*Sooryo Horn*” yang diurus oleh Bagian kehakiman dari Gunseikanbu. Adapun peraturan dan batas wewenang kekuasaannya tetap seperti pada masa Hindia Belanda.¹¹⁴

Setelah masa kemerdekaan, pelaksanaan hukum (syariat) Islam dijamin oleh UUD 1945. Konsekuensinya, Pengadilan Agama dikembalikan fungsinya sebagai pengadilan yang sebenarnya dan sejajar dengan pengadilan yang lain. Teori

¹¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 72

¹¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 89

receptie mulai ditinggalkan karena tidak sejiwa dengan pasal 29 UUD 1945.¹¹⁵

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Sebagai sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk memberikan sebuah keadilan bagi para pencari keadilan yang berdasarkan Hukum Islam, adapun visi dari Pengadilan Agama Jepara adalah: "Terwujudnya Peradilan Agama yang berwibawa, bermartabat, profesional dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme". Visi tersebut diterapkan dengan makna yang kuat dan mendalam. Dari visi tersebut dapat didapatkan beberapa makna, yaitu :¹¹⁶

a) Secara Organisasional

Peradilan Agama adalah lembaga Pengadilan Agama Jepara yang terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, seluruh Pejabat Struktural maupun fungsional beserta seluruh staf.

b) Secara Fungsional

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pengadilan Agama Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsinya

¹¹⁵ Tim Penyusun PA Jepara, *Sejarah Peradilan Agama Jepara*, Jepara: PA Jepara, 1989.

¹¹⁶ Tim Penyusun PA Jepara, *Sejarah Peradilan Agama Jepara*, Jepara: PA Jepara, 1989.

senantiasa menjaga kewibawaan dan martabat dengan cara mengutamakan kejujuran dan transparansi agar senantiasa bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan dengan memberikan pelayanan secara profesional dengan memperhatikan asas pelaksanaan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah ditetapkan misi Pengadilan Agama Jepara. Adapun misi yang diemban pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut:¹¹⁷

- a) Melaksanakan pelayanan hukum dan keadilan dengan seksama, jujur, obyektif dan transparan sehingga dipercaya oleh masyarakat.
- b) Melaksanakan peradilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c) Melaksanakan peradilan yang merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.
- d) Melaksanakan Peradilan dengan tidak membedakan orang yang bersifat diskriminatif, baik dalam bentuk diskriminasi normatif maupun diskriminasi kategoris yang berasal dari status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya.

¹¹⁷ Tim Penyusun PA Jepara, *Sejarah Peradilan Agama Jepara*, Jepara: PA Jepara, 1989.

- e) Mengembangkan penerapan manajemen modern dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.
- f) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dan jalannya peradilan.
- g) Memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang hukum Islam yang menjadi kompetensi Peradilan Agama.
- h) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Pemerintah Kabupaten melalui forum MUSPIDA.¹¹⁸

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara

Sebagai sebuah lembaga peradilan yang bernaung pada kekuasaan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Jepara telah memiliki anggota jajaran pegawai yang lengkap. Adapun struktur organisasi yang dimiliki Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut :¹¹⁹

¹¹⁸ <http://www.pa-jepara.go.id>

¹¹⁹ <http://www.pa-jepara.go.id>

Ketua	: Drs. H. Abd.Malik, SH.,M.S.I
Wakil Ketua	: Drs. H. Ujang Jamaludin. SH.,M.H
Hakim	: Drs. H. Jamadi,Chamidah, S.Ag, Drs. H. Tahrir, M.H.Drs.H. Mahrin Fifa,I, S.Ag.,S.H.,M.H
Panitera	: Hj. Hamdanah. S.Ag
Wakil Panitera	: Drs. H. Sarwan. M.H
Sekretaris	: Ali Imron S.H
Kasubag Umum dan Keu	: Ghufron, S.H
Staf Umum dan Keu	: Salamun
Kasubag Kepeg dan Ortala	: Kholifah, S.H
Staf Kepeg dan Ortala	: Karmain
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	: Furqon Aziez, S.E
Panmud Gugatan	: H. Mustain, S.Ag
Panmud Permohonan	: Drs. H. Rosidi
Panmud Hukum	: Ahmad Nuri, S.Ag

Panitera Pengganti : Harmin, S.Ag H. Syamsyuddin, S.Ag
Kholiq, S.H

Jurusita Pengganti : Siti Badiroh, S.H Hartatik, S.H
Sri Inayah, S.H Sulastrin¹²⁰

B. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2016/PA.Jepr

1. Pemohon dan Termohon

Nama, Heruwanto bin Karjan, No. Induk KTP 3320141305880002, lahir di Jepara pada 13 Mei 1990. Beralamat di RT.001 RW. 001 Desa Gemulung Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, bekerja sebagai tukang kayu, dan pendidikan terakhir SMP; telah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Jepara. Selanjutnya, nama N a m a : Nava Indah Fatmawati binti Supriyanto No. KTP 3320145306910006, lahir di Jepara pada tanggal 13 Juni 1997, beralamat di RT.003 RW. 005 Desa Gemulung Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dan sering pergi dari rumah pasca menikah dengan Heruwanto bin Karjan, selanjutnya ia berkedudukan sebaga termohon. Pengadilan Agama tersebut; telah membaca bekas perkara; telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti secara seksama.

¹²⁰ <http://www.pa-jepara.go.id>

2. Duduk Perkaranya

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1130 Pdt.G/2016/PA.Jepr tanggal 03 Agustus 2016, telah mengajukan halnya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 November 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0581/025/XI/2015 Tertanggal 25 November 2015. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1,5 bulan. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun sampai saat ini disebabkan pernikahan tersebut atas kehendak orang tua (dijodohkan).

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 minggu dan tidak mau pulang jika masih ada Pemohon di rumah orang tua Termohon akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan, selain itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan

kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi.

Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Heruwanto bin Karjan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nava Indah Fatmawati binti Supriyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Memohon putusan yang seadil-adilnya

3. Pertimbangan Hukum

Pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon telah ternyata datang di persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan, telah dipanggil dengan sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon;

Untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Pendduduk atas nama Pemohon Nomor 3320022204900002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 12 Oktober 2012, yang telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 581/025/XI/2015, tertanggal 25 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, yang telah dinasegelen dan dilegalisir

serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dari tetangga terdekat masing masing bernama:

1. Moh Rojak bin Sumitro, umur 60 tahun Agama Islam, pekerjaan Dagang, Tempat Kediaman Rt.03 Rw.05 setelah bersumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - a. Sebagai tetangga dekat saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 2015 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama selama 02 bulan;
 - b. Sejak Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mau dikumpuli oleh Pemohon bahkan Termohon pernah pergi ke Kendal, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
 - c. Sejak Januari tahun 2016 Termohon pergi sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 8 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan

sejak itu Pemohon tidak pernah pulang dan tidak pernah ada komunikasi dengan Termohon;

2. Hj Sutinah binti H. Supeno, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - a. Sebagai tetangga dekat saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 2015 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama selama 02 bulan;
 - b. Sejak Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon pernah pergi ke Kendal, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
3. Sejak Januari tahun 2016 Termohon pergi sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 8 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Pemohon tidak pernah pulang dan tidak pernah ada komunikasi dengan Termohon.

Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Untuk

membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti.

4. Diktum/Putusan

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Heruwanto bin Karjan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nava Indah Fatmawati binti Supriyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Jepara Mengenai Tidak Adanya Mahar Hingga Putusan Perceraian *Ba'da Dukhul* (Putusan PA Jepara Nomor 1130/PRT.G/2016/PA.)

Dr. H. Tahrir, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Jepara mengatakan bahwa sejatinya pemberian mahar diberikan dan tetap menjadi hak istri setelah penyaksian ikrar talak yang dilakukan oleh suami. Pada perkara cerai talak yang menjadi putusan berkekuatan hukum tetap adalah setelah suami membacakan ikrar talak.¹²¹

Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang telah menjelaskan bahwa perempuan yang dicerai pada waktu *ba'da dukhul* berhak mendapatkan mahar. Allah berfirman dalam Qs;al-Baqarah;237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُورَ أَوْ يَعْفُورَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: *“jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,*

¹²¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama jepara Bapak Dr. H. Tahrir, M.H. pada tanggal 14 September 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Jepara.

kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.

Namun, pada kenyataannya teori tersebut berbeda dengan apa yang telah dipraktekan oleh majlis hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memutuskan perceraian tanpa mahar bagi istri ba'dha dukhul. Tidak diterapkannya teoritas tersebut dilator belakanginya oleh bebrapa faktor.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memutuskan tidak adanya mahar kepada istri yang ditalak terdapat berbagai alasan. Tentunya, pertimbangan tersebut merupakan keputusan yang seadil-adilnya yang diputuskan oleh pihak majlis hakim Pengadilan Agama Jepara.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. H. Tahrir, M.H. selaku Hakim Anggota memberikan penjelasan terkait putusan tersebut. Adapun dasar pertimbangannya ialah:

1. Putusan verstek

Putusan verstek ialah putusan yang tidak dihadiri oleh pihak termohon. Berdasarkan putusan verstek, hakim memutuskan tidak adanya mahar terhadap pihak istri/termohon. Hal ini, dianggap oleh majlis hakim, bahwa pihak istri/termohon telah menyutujui apapun putusan majlis hakim.

Meskipun bagi si termohon/istri pada kenyataannya tidak memberikan rasa adil dan memberikan hak pada dirinya.

2. Istri dianggap nuyuz

Alasan lain lain yang menjadi pertimbangan oleh majlis hakim dalam memberikan putusan tidak adanya mahar terhadap si termohon/istri ialah si termohon/istri melakukan perbuatan nuyuz. Kejadian ini bermula dari pernikahan atra dua mempelai yang terwujud karena perjudohan. Setelah menjalani hidup berkeluarga kedua mempelai mengalami masalah. Puncak perselesihan terjadi pada saat si istri yang melarikan diri selama satu minggu. Istri nusyuz ialah istri yang durhaka kepada suami, ia tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah dan iddah. Contoh istri durhaka/nusyuz ialah menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas, istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin suami, memukul atau menyakiti suami secara fisik, selingkuh, dan boros membelanjakan harta bersama atau harta suami. Perbuatan lain yang dikategorikan istri nusyuz ialah istri mengusir suaminya dari rumah, menghina atau menyepelkan suami, berkata kasar atau tidak

sopan kepada suaminya, menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain.¹²²

Pada Putusan Pengadilan PA Jepara Nomor 1130/PRT.G/2016/PA, Bapak Tahrir menerima permohonan pengajuan talak dari pemohon dengan latar belakang ikatan perkawinan yang mereka jalin tidak berjalan harmonis. Alasan mendasarnya ialah, sang istri tidak mencintainya, dan pernikahan itu dilatarbelakangi perjodohan sepihak (tidak dikonfirmasi oleh perempuan; istri). Lebih mengejutkan lagi, setelah satu bulan pernikahan, isteri pergi dari rumah bersama tanpa ijin kepada suami terlebih dahulu, dan ia tidak mau kembali jika si suami berada di kediaman rumah orang tua istri.¹²³

Putusan hakim Pengadilan Agama Jepara mengenai talak tanpa nafkah mut'ah dan *iddah* ialah, pertama karena istri telah terbukti melakukan nusyuz dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, pertimbangan lain yang memperkuat nusyuz ialah, istri tidak hadir di persidangan tanpa

¹²² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama jepara Bapak Dr. H. Tahrir, M.H. pada tanggal 14 September 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Jepara.

¹²³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama jepara Bapak Dr. H. Tahrir, M.H. pada tanggal 14 September 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Jepara.

mewakikan kepada kuasa hukumnya. Oleh sebab itu pula hakim memutus dengan putusan verstek.¹²⁴

Mengenai putusan cerai bakda dukhul tanpa mahar, alasan hakim tidak ingin menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon dan hanya mengabulkan petitum pemohon semata dengan alasan termohon tidak mengajukan gugatan balik sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg. Pasal tersebut memberi petunjuk bahwa hakim dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon, karena hal itu merupakan ultra petitum partium partium yang melarang hakim mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Tindakan hakim harus sesuai dengan hukum (*accordance with the law*) dan harus mengikuti prinsip *rule of law*; siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).¹²⁵

Dalam perspektif yang lain, berdasarkan asas hukum acara, hakim bersifat pasif atau tidak memberikan nasehat kepada pemohon atau termohon talak terhadap akibat dari cerai talak satu raj'i. Atau hakim berpedoman kepada asas

¹²⁴ *Ibid.*,

¹²⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama jepara Bapak Dr. H. Tahrir, M.H. pada tanggal 14 September 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Jepara.

impartiality dimana memberi nasehat dan bantuan hukum seperlunya kepada termohon adalah bentuk keberpihakan, padahal hakim dituntut untuk netral, adil dan jujur.¹²⁶

¹²⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama jepara Bapak Dr. H. Tahrir, M.H. pada tanggal 14 September 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Jepara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA.Jepr tentang Tidak Adanya Mahar dalam Perceraian *Ba'da Dukhul*

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainya atau siapapun walaupun sangat dekat denganya. Orang lain tidak boleh menjamah apa lagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.¹²⁷ Dalam posisi apapun, mahar akan tetap menjadi hak istri. Kecuali terdapat unsur syar'i yang menghapus atas adanya mahar terebut.

Terdapat berbagai pertimbangan dalam memutuskan perkara cerai. Misalnya, dalam perkara perceraian ba'dha dukhul antara suami dan istri. Apakah si istri tetap berhak mendapatkan mahar atau tidak. Sejatinya pemberian mahar diberikan dan tetap menjadi hak istri setelah penyaksian ikrar talak yang dilakukan oleh suami.

¹²⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 175

Pada perkara cerai talak yang menjadi putusan berkekuatan hukum tetap adalah setelah suami membacakan ikrar talak.¹²⁸

Namun, pada kenyataannya teori tersebut berbeda dengan apa yang telah dipraktekan oleh majlis hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memutuskan perceraian tanpa mahar bagi istri *ba'dha dukhul*. Oleh sebab itu, penulis memberikan analisis terhadap pertimbangan tersebut dengan membagi beberapa poin.

1. Pertimbangan dengan alasan putusan verstek

Putusan verstek ialah putusan yang tidak dihadiri oleh pihak termohon. Berdasarkan putusan verstek, hakim memutuskan tidak adanya mahar terhadap pihak istri/termohon. Hal ini, dianggap oleh majlis hakim, bahwa pihak istri/termohon telah menyutujui apapun putusan majlis hakim. Meskipun bagi si termohon/istri pada kenyataannya tidak memberikan rasa adil dan memberikan hak pada dirinya.

Verstek belum kuat untuk bisa dijadikan dasar hukum atas jatuhnya putusan tidak adanya mahar pada perceraian bagi istri yang sudah dikumpul. Sebab, mahar menjadi gugur atau menjadi hapus seluruhnya, dibebaskan dari kewajiban membayar mahar sepenuhnya, apabila terjadi perceraian di antara suami isteri sebelum bersetubuh, sedangkan perceraian ini disebabkan oleh:

¹²⁸ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 40.

- a. Permintaan dari isteri karena pada suami terdapat cacat badan, atau suami tidak mampu memberi nafkah, dan kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
- b. Permintaan dari suami karena pada isteri terdapat cacat badan, atau isteri keluar dari Islam, kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
- c. Suami menthalak isterinya sebelum terjadi bersetubuh, sedang suami ketika akad perkawinan tidak menetapkan kesanggupan membayar sejumlah mahar, hanya suami dalam hal ini berkewajiban memberi mut'ah (pemberian untuk menggembirakan isteri).¹²⁹

Dari perpaduan antara kasus dan teori uraian di atas bisa dilihat bahwa mahar tetap harus diberikan kepada seorang istri yang telah disetubuhi. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang jelas. Apapun alasannya, mahar adalah hak seorang istri. Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang telah menjelaskan bahwa perempuan yang dicerai pada waktu ba'da dukhul berhak mendapatkan mahar. Allah berfirman dalam Qs;al-Baqarah;237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ

¹²⁹ Ibid., hlm. 43-44.

تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.¹³⁰

Ayat di atas menjelaskan, bahwa seorang istri berhak mendapatkan mahar dari seorang suami. Apabila si istri belum dicampuri, maka ia berhak mendapatkan seperdua dari mahar itu. Apabila sudah dicampuri, maka suami tidak bisa untuk mengambil mahar. Allah berfirman dalam QS an-Nisa' Ayat 20-21:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢١﴾ وَكَيْفَ

¹³⁰ Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemah”,
(Jakarta:Depag RI, 2013), hlm 29

تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٦٦﴾

Artinya: *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.*¹³¹

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan. Dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali,

Dari ayat-ayat dia atas sudah jelas, seorang suami tidak berhak mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istri yang sudah dikumpuli. Dengan mempertimbangkan dasar-dasar tersebut, putusan Pengadilan

¹³¹ Ibid., hlm. 64.

Agama Jepara seharusnya tidak sepenuhnya memutuskan bahwa istri tidak mendapatkan mahar sepeserpun dari pihak suami.

2. Istri dianggap nuyuz

Pada Putusan Pengadilan PA Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA, Bapak Tahrir menerima permohonan pengajuan talak dari pemohon dengan latar belakang ikatan perkawinan yang mereka jalin tidak berjalan harmonis. Alasan mendasarnya ialah, sang istri tidak mencintainya, dan pernikahan itu dilatarbelakangi perjodohan sepihak (tidak dikonfirmasi oleh perempuan; istri). Lebih mengejutkan lagi, setelah satu bulan pernikahan, isteri pergi dari rumah bersama tanpa ijin kepada suami terlebih dahulu, dan ia tidak mau kembali jika si suami berada di kediaman rumah orang tua istri.¹³²

Alasan lain lain yang menjadi pertimbangan oleh majlis hakim dalam memberikan putusan tidak adanya mahar terhadap si termohon/istri ialah si termohon/istri melakukan perbuatan nuyuz. Kejadian ini bermula dari pernikahan atra dua mempelai yang terwujud karena perjodohan. Setelah menjalani hidup berkeluarga kedua mempelai mengalami masalah. Puncak perselesaian terjadi pada saat si istri yang

¹³² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama jepara Bapak Dr. H. Tahrir, M.H. pada tanggal 14 September 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Jepara.

melarikan diri selama satu minggu. Istri nusyuz ialah istri yang durhaka kepada suami, ia tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah dan iddah.¹³³ Dan perlu ditegaskan, hanya nafkah mut'ah dan iddah. Jadi mahar tetap menjadi hak yang harus didapat oleh seorang istri.

Sayyid Sabiq dal kitabnya yang berjudul Fiqih Sunnah menjelaskan bahwa nuyuz bukan menjadi alasan ataupun dasar ditiadakananya ataupun dihilangkannya mahar bagi istri yang sudah dikumpuli. Hukuman bagi istri yang nuyuz ialah istri tidak mendapatkan nafkah mut'ah bukan meniadakan mahar. Lebih jelasnya, sayyid Sabiq memberikan rincian terhadap apa yang menjadi sebab yang menggugurkan maskawin itu ialah:

1. Suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya senggama (qobla dukhul) datang dari pihak istri.
2. Istri mengajukan fasakh karena suami miskin atau cacat.
3. Suami itu mengajukan fasakh karena istri itu cacat.

Dengan sebab-sebab di atas kewajiban memberi mut'ah gugur. Karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu daripadanya. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi, sebagaimana halnya hukum seorang penjual yang

¹³³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama jepara Bapak Dr. H. Tahrir, M.H. pada tanggal 14 September 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Jepara.

tidak jadi menyerahkan barangnya kepada pembelinya. Begitu juga maskawin itu gugur apabila istri belum disenggamai itu merelakannya (melunaskan) atau menghibahkan kepada suaminya. Dalam hal seperti ini gugurnya mahar dikarenakan isrtinya sendiri yang menggugurkan. Dan mahar adalah hak penuh bagi istri.¹³⁴

Dari uraian analisis diatas, menurut penulis, bisa diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak adanya mahar kurang sesuai dengan al-Quran dan pendapat dari ulama salaf. Jika putusan verstek, tetap hakim harus meminta kerelaan pada si istri. Dan jika karena nuyuz, tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan. Lebih tepatnya ialah apabila istri yang meminta cerai dan melakukan fazakh terhadap suami.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1130/Pdt.G/2016/PA.Jepr. tentang Tidak Adanya Mahar dalam Perceraian *Bakda Dukhul*

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan

¹³⁴ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Fiqih Sunnah* 7, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990, hlm. 68.

perkara mereka secara tuntas, melainkan putusan tersebut telah dilaksanakan.¹³⁵

Ketika perkara perceraian diajukan oleh suami, maka hukum mengartikannya dengan sebutan cerai talak dan manakala pihak istri yang mengajukan perkara perceraian, hukum mengartikannya dengan sebutan cerai gugat. Karena antara suami dan istri sama dimata hukum dan mempunyai hak secara bebas untuk menjaga berlangsungnya rumah tangga atau tidak dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum.¹³⁶

Putusan Pengadilan PA Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA, Bapak Tahrir menerima permohonan pengajuan talak dari pemohon dengan latar belakang ikatan perkawinan yang mereka jalin tidak berjalan harmonis. Alasan mendasarnya ialah, sang istri tidak mencintainya, dan pernikahan itu dilatarbelakangi perjodohan sepihak (tidak dikonfirmasi oleh perempuan; istri). Lebih mengejutkan lagi, setelah satu bulan pernikahan, isteri pergi dari rumah bersama tanpa ijin kepada suami terlebih dahulu, dan ia tidak mau kembali jika si suami berada di kediaman rumah orang tua istri.

Pengadilan Agama Jepara pada perkara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA, memutuskan tidak ada mahar dalam

¹³⁵ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 151.

¹³⁶ Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, hlm. 55.

perceraian *ba'dha dhuhul*. Sesuai dengan dasar pertimbangannya, majlis hakim pengadilan agama jepara menggunakan dasar verstek dan nuyuz. Yang pada sub bab A telah penulis analisis. Pada sub bab ini, penulis memberikan analisi hukum Islam terhadap keputusan hakim yang memutuskan tidak adanya mahar dalam perceraian *ba'dha dukhul*.

Beberapa dasar hukum telah memberikan penegasan tentang mahar bagi perempuan. Pada dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa mahar untuk istri yang telah dicampuri adalah hal yang wajib bagi suami. Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang telah menjelaskan bahwa perempuan yang dicerai pada waktu *ba'da dukhul* berhak mendapatkan mahar. Allah berfirman dalam Qs;al-Baqarah;237.

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjelaskan dengan jelas, bahwa seorang istri berhak mendapatkan mahar dari seorang suami. Apabila si istri belum dicampuri, maka ia berhak mendapatkan seperdua dari mahar itu. Apabila sudah dicampuri, maka suami tidak bisa untuk mengambil mahar. Allah berfirman dalam QS an-Nisa’ Ayat 20-21:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.¹³⁷

¹³⁷Loc.Cit., hlm. 64.

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan. Dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali,

Dalam kasus perceraian ini, alasan yang menjadi pertimbangan oleh majlis hakim dalam memberikan putusan tidak adanya mahar terhadap si termohon/istri ialah si termohon/istri melakukan perbuatan nuyuz.¹³⁸ Istri nusyuz ialah istri yang durhaka kepada suami, ia tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah dan iddah. Dan perlu ditegaskan, hanya nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Jadi mahar tetap menjadi hak yang harus didapat oleh seorang istri.

Telah diketahui, bahwa nuyuz beberapa kategori tindakan isteri *nusyuz* ialah:¹³⁹

1. Menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas
2. Istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin suami
3. Memukul atau menyakiti suami secara fisik
4. Selingkuh
5. Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami.

¹³⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama jepara Bapak Dr. H. Tahrir, M.H. pada tanggal 14 September 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Jepara.

¹³⁹ Harijah Damis, *Menguak Hak-Hak Wanita*, Palopo: Two.F Publisher, 2009, hlm. 82.

Adapun *nusyuz* istri dalam bentuk perkataan adalah:

1. Istri mengusir suaminya dari rumah
2. Menghina atau menyepelekan suami
3. Berkata kasar atau tidak sopan kepada suaminya
4. Menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain.¹⁴⁰

Dari kasus perceraian diatas bisa dilihat bahwa istri telah dicampuri, bagaimana bisa dikatakan ia nuyuz. Kepergian istri disebabkan karena masalah. Jadi putusan majlis hakim tidak memberikan mahar kepada istri adalah keputusan yang kurang bijak. Bebrapa ayat al-quran telah menjelaskan bahwa dalam perceraian terhadap istri yang sudah dikumpul b erhak mendapat mahar.

Menurut penulis, bisa diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak adanya mahar kurang sesuai dengan al-Quran dan pendapat dari ulama salaf. Jika putusan verstek, tetap hakim harus meminta kerelaan pada si istri. Dan jika karena nuyuz, tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan. Lebih tepatnya ialah apabila istri yang meminta cerai dan melakukan fazakh terhadap suami.

Sifat mahar adalah hak yang harus didapat seorang istri dan menjadi kewajiban bagi seorang suami. Sebab, lepas dan adanya mahar tergantung pada kerelaan hati seorang istri yang diceraikan. Jika istri merelakan, maka kewajiban membayar mahar

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 83.

harus dilaksanakan. Dan apabila, seorang istri tetap meminta, maka seorang suami harus membayar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik pada pokok permasalahan di atas dan dengan mendasarkan pada deskripsi serta analisis pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab kelima ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang penulis lakukan sekaligus sebagai jawaban sesuai dengan perumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Jepara pada perkara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA, memutuskan tidak ada mahar dalam perceraian *ba'dha dhuhul*. Sesuai dengan dasar pertimbangannya, majlis hakim pengadilan agama jepara menggunakan dasar verstek dan nuyuz. Dalam pertimbangan karena verstek, belum kuat untuk bisa dijadikan dasar hukum atas jatuhnya putusan tidak adanya mahar pada perceraian bagi istri yang sudah dikumpuli. Sebab, mahar menjadi gugur atau menjadi hapus seluruhnya, dibebaskan dari kewajiban membayar mahar sepenuhnya. Sedangkan dengan pertimbangan nuyuz, nuyuz bukan menjadi alasan ataupun dasar ditiadakannya ataupun dihilangkannya mahar bagi istri yang sudah dikumpuli. Hukuman bagi istri yang nuyuz ialah istri tidak mendapatkan nafkah mut'ah bukan meniadakan mahar.

2. Beberapa dasar hukum telah memberikan penegasan tentang mahar bagi perempuan. Pada dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa mahar untuk istri yang telah dicampuri adalah hal yang wajib bagi suami. Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang telah menjelaskan bahwa perempuan yang dicerai pada waktu ba'da dukhul berhak mendapatkan mahar. Allah berfirman dalam Qs;al-Baqarah;237. Dan jika karena nuyuz, tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan. Lebih tepatnya ialah apabila istri yang meminta cerai dan melakukan fazakh terhadap suami. Sifat mahar adalah hak yang harus didapat seorang istri dan menjadi kewajiban bagi seorang suami. Sebab, lepas dan adanya mahar tergantung pada kerelaan hati seorang istri yang dicerai. Jika istri merelakan, maka kewajiban membayar mahar harus dilaksanakan. Dan apabila, seorang istri tetap meminta, maka seorang suami harus membayar.

B. Penutup

Demikian skripsi ini penulis susun dengan penuh tanggung jawab. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tulisan ini. Kritik dan saran penulis butuhkan sebagai upaya penyempurnaan penelitian ini. *Wallahu A'lam Bishawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 2*, Terj. Nor Hasanuddin, Cet. I. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Nur Djaman, *Fiqih Munakahat*, Semarang : Toha Putra, 1993.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : 1998.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ghazaly Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat “ Seri Buku Daras ”*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, 1990.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab “Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali”*, Terj. Masykur A.B.,dkk, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, 2001.

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

P. Joo Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Hadi Sutrisno, *Metode Research* cet. X, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Atlas, 1998.

Al-jaziry Abdurahman, *Al-Fiqh’ ala Madzahib al-arba’ah.*, juz 4.

Fuad Muhammad, *Fiqih Wanita*, Tt: Lintas Media, 2007.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuahu Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng Illa, Istri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Pasha Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.

Syarjaya Syibli, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Al-Buhiy M. Labib, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung : al-Ma'arif, 1983,

Aziz al-Jandul Said Abdul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003.

Ahmad Idris, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Karya indah, 2002.

al-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t,

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Cet II, Yogyakarta: Liberti, 1986.

Ar-Rifa'i Muhammad Nasib, *Tafsiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. Syihabuddin Jakarta:Gema Insani, 2007

Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan ahlu-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Al-Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi, Juz II*, Semarang : Toha Putra, 1984.

Rusyd Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II.

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.

Hamid Zaid ibn Husain, *Kamus Muyassar*, Pekalongan: Raja Murah, 1982.

Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Bahder Johan Nasution, , *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984.

Syaharani Hensyah, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 2000.

Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Djalill A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, Cet. Ke-1, 2006.

Tim Penyusun PA Jepara, *Sejarah Peradilan Agama Jepara*, Jepara: PA Jepara, 1989.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2009.

Rasyid Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

<http://www.pa-jepara.go.id>

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama jepara Bapak Dr. H. Tahrir, M.H. pada tanggal 14 September 2017 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Jepara.

Pasal 4 huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mustain, *Wawancara*, Jepara 12 Agustus 2017.

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-6. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Suyuti Wildan, *Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama, Dilengkapi dengan Permasalahan dan Pemecahan*, Edisi revisi, Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2005.

Nava Indah Fatmawati, *Wawancara dengan Mantan Istri Hariyanto*, Jepara, 16 Agustus 2017.

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010, (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010),

Putusan No. 499 K/Sip/1970, lihat Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2010*, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2010.

Putusan Nomor: 184 K/AG/2009, tanggal 4 Agustus 2009, *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXV No. 289 Desember 2009*, Jakarta:IKAHI, 2009.

Kamil Ahmad, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2005.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi IV, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Arto A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Wibowo Basuki Rekso, “Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan”, *Varia Peradilan*, *Majalah Hukum*, Tahun XXVII No. 313 Desember 2011, Jakarta: IKAHI, 2011.

Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi lebih dikenal Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, dari Ahmad bin Abdullah bin Yunus dari Zuhair dari Abu Zubair dari Al-Jabir bin Abdullah Radhiyallahu’anh, Kairo: Sya’bi, 1393 H/1973 M.

Shiddieqy TM. Hasby Ash., *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Subulussalam Ashshon’any, , *Syarakh Bulughul Maram min Jami’il Adillatil Akhkam* karya Ibnu Hajar Al-Asqalany, Juz III, Mesir: Darul Ulum, 1958.

Syahrani, Riduan *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sastroatmodjo Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Kompilasi Hukum Islam (edisi revisi 2012), Bandung: CV. Nuansa Auliya.

Nasution Khoiruddin , *Tentang Wanita*, cet .1, Yogyakarta: Tazaffa+Academia, 2002.

Damis Harijah, *Menguak Hak-Hak Wanita*, Palopo: Two.F Publisher, 2009.

Dengar redaksi yang sama lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat pula Pasal 119 HIR/143 RBg dan Pasal 132 HIR/156 RBg.

PEDOMAN WAWANCARA

Tidak Adanya Mahar Hingga Putusan Perceraian *Ba'da Dukhul* (Analisis Putusan PA Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA.Jepr.)

Kepada: Hakim Pengadilan Agama Jepara Bapak Drs. H. Tahrir, M.H.

1. Pada perkara cerai talak, istri memiliki hak-hak terhadap talak yang dijatuhkan oleh mantan suaminya seperti mut'ah dan nafkah iddah. Apakah hak-hak tersebut secara otomatis dapat dimiliki oleh mantan istri tanpa mengajukan gugatan rekonsvensi?

Ya istri dapat memiliki mut'ah dan nafkah iddah tanpa mengajukan gugatan rekonsvensi karena hakim secara ex-officio dapat menentukan mut'ah dan nafkah iddah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ketika suami menjatuhkan talak, maka istri berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah kecuali istri qabla dukhul dan nusyuz.

2. Apakah ada syarat tertentu agar istri dapat memiliki hak- haknya atas talak yang dijatuhkan mantan suami?

Iya ada. Syarat istri untuk dapat memiliki haknya adalah istri tidak nusyuz dan qabla dukhul sebagaimana yang tercantum dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Pada kasus perceraian Nomor 1130/PDT.G/2016/PA.Jepr., Mengapa Bapak tidak memberikan putusan penetapan mahar kepada mantan isteri?

Pada kasus ini, istri telah terbukti melakukan nusyuz dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, pertimbangan lain yang memperkuat nusyuz ialah, istri tidak hadir di persidangan tanpa mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Oleh sebab itu pula hakim memutus dengan putusan verstek.

4. Apa landasan Bapak hakim memutus dengan putusan verstek?
Karena termohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil dan telah dilakukan upaya penyebaran informasi.

Jepara, 14 September 2017

Interviewer

Interviewee

Deny Irawan
M.H.

Dr. H. Tahrir,

DAFTAR RIWAYAR HIDUP

NAMA : DENY IRAWAN
NIM : 132111051
TEMPAT TANGGAL LAHIR : JEPARA 06 JANUARI 1995
FAKULTAS/JURUSAN : SYARI'AH DAN HUKUM
ALAMAT : DESA KRIYAN RT 14 RW 03
KECAMATAN KALINYAMAT
KABUPATEN JEPARA
NO TELP : 081327787754
AGAMA : ISLAM
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

Menerangkan dengan sesungguhnya riwayat pendidikan formal

Jenjang pendidikan

1. SDN 01 kriyan tahun lulus 2006
2. Smp islam sulatan agung 03 kriyan tahun lulus 2009
3. Sma islam sultan agung 02 kriyn tahun lulus 2013
4. S-1 jurusan ahwal al syahsiyah fakultas syariah dan hukum walisongo semarang
5. Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benar nya untuk bisa digunakan sebagaimana semestinya

Semarang 23 Januari 2018

DENY IRAWAN
NIM : 132111051